

RENCANA STRATEGIS

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA PASURUAN

2025 - 2029

www.kominfo.pasuruankota.go.id
@kominfokotapasuruan
Ramapati 92.7 MHz, FM

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 merupakan acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah (PD) yang berlaku lima tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kominfotik merupakan wujud nyata dari pelaksanaan rencana pembangunan pada Dinas Kominfotik. Diharapkan nantinya Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahun 2029 guna meningkatkan kinerja Dinas Kominfotik Kota Pasuruan.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Dinas Kominfotik Kota Pasuruan. Dinas Kominfotik Kota Pasuruan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dinas Kominfotik Kota Pasuruan juga berharap bahwa Renstra ini dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Sekian, terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini.

Pasuruan, 19 september 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA PASURUAN

IMAM SUBEKTI, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19730709 199201 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK **8**

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 8

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 29

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK **36**

3.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra Tahun 2025-2029 36

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan 42

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **44**

BAB V PENUTUP **67**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan telah berakhirnya periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2021-2026, maka dengan berpedoman pada RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2025-2029 untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Pesatnya kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mendorong perluasan jaringan akses informasi dan komunikasi dalam lingkup global, sehingga komunikasi dan lalu lintas informasi menjadi seolah-olah tanpa batas kewilayahan, tanpa batas negara, tanpa batas jarak dan waktu. Proses komunikasi dan penyebaran informasi merupakan perkembangan teknologi yang menyebabkan masyarakat harus mengikuti kemajuan tersebut yang secara mendasar telah mengubah dan mentransformasikan pola hidup dalam melakukan berbagai kegiatan, termasuk di bidang pemerintahan.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Layanan *e-Government,* Statistik dan Persandian yang dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik. Sehingga tercapai pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik akan informasi. Dalam hal ini diharapkan masyarakat lebih berdaya dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bagi jajaran pemerintah akan terwujudnya implementasi *e–government* secara utuh yang menjadi tujuan yang diharapkan.

Memperhatikan hal tersebut, kiranya berbagai media informasi perlu lebih diberdayakan dan didayagunakan dalam upaya penyebarluasan dan pemerataan informasi kepada masyarakat. Di samping itu dengan tetap mendorong peran strategis potensi lembaga komunikasi masyarakat untuk dapat menjadi penyebar informasi sekaligus sebagai *public relation* di daerahnya.

Dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Diskominfotik tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Diskominfotik.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah ke-2 kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 3 Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025-2045;
28. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 – 2029;
29. Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

30. Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
31. Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Periode 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman dan panduan bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sampai dengan tahun 2029 sebagai berikut :

Adapun maksud dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan adalah :

1. Memberikan gambaran secara detail tentang pelayanan, sumber daya, dan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan yang di dukung dengan kinerja Perangkat Daerah;
2. Memberikan gambaran tentang isu-isu strategis tentang Komunikasi, Informatika dan Statistik di Kota Pasuruan dan keterkaitannya dengan upaya pembangunan tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
3. Penetapan tujuan, sasaran dan strategi kebijakan Bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik, bidang pelayanan publik dan bidang persandian, disertai dengan gambaran Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pagu Indikatifnya yang diperlukan oleh OPD terkait.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sampai dengan Tahun 2029 adalah untuk :

1. Mendorong terwujudnya Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan;

2. Mewujudkan keterkaitan antara setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap bidang urusan dalam lingkup Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan Visi dan Misi Dinas;
3. Meningkatkan sinergi, integrasi, dan sinkronisasi program/kegiatan antar bidang dan antar seksi dalam penyelenggaraan pembangunan sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas pendayagunaan sumber daya pembangunan.
4. Menjadi acuan dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sampai dengan 2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo dan Statistik) Kota PasuruanTahun 2025–2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V : PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik berperan penting dalam mendukung transformasi digital dan pelayanan publik yang efektif di lingkungan pemerintah daerah. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mengampu tiga urusan pemerintahan yakni urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informasi publik, teknologi informatika serta bidang statistik, persandian dan pengamanan informasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2022, maka fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan adalah:

a. Penyusunan perencanaan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan persandian;
b. Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan persandian;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan persandian;
d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan persandian; dan
f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun dan merumuskan kebijakan strategis dinas;
2. Memimpin penyelenggaraan urusan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian dalam rangka mencapai target kinerja dinas;
3. Memimpin evaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik;
4. Mengendalikan dan mengarahkan menggunakan sumber daya manajemen pada dinasnya;
5. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi, dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, maka diperlukan pembagian tugas dalam pelaksanaan pekerjaan yang sekaligus harus ditunjang dengan pelimpahan wewenang. Sehubungan dengan pembagian tugas, maka pembidangan dalam Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Mempunyai tugas pokok untuk mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

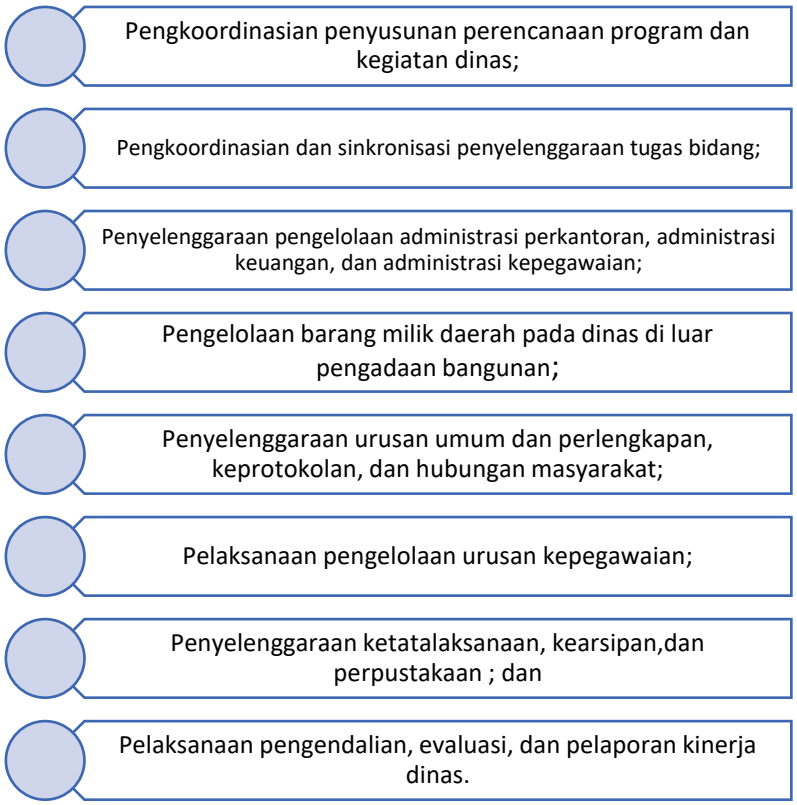

Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik dipimpin oleh Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik yang membawahi Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Adapun tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Sekretaris mempunyai tugas:
   1. Membantu Kepala Dinas untuk mengkoordinasikan pembahasan substansi kebijakan teknis yang disiapkan oleh masing-masing bidang;
   2. Membantu Kepala Dinas dalam pengendalian, monitoring, dan pencapaian target masing-masing bidang;
   3. Membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang;
   4. Membantu Kepala Dinas dalam rangka pengelolaan sumber daya manajemen; dan

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Penyusun Program dan Keuangan mempunyai tugas:
   1. Menyusun rencana kerja subbagian;
   2. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan dinas;
   3. Menyiapkan bahan analisis, evaluasi, serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
   4. Menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja dinas;
   5. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengelolaan administrasi keuangan;
   6. Melaksanakan layanan perbendaharaan;
   7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan dinas;
   8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
   9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
   1. Menyusun rencana kerja subbagian;
   2. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, dan kebersihan di lingkungan kerja;
   3. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
   4. Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada dinas di luar pengadaan bangunan;
   5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
   6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, dan perpustakaan;
   7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
   8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

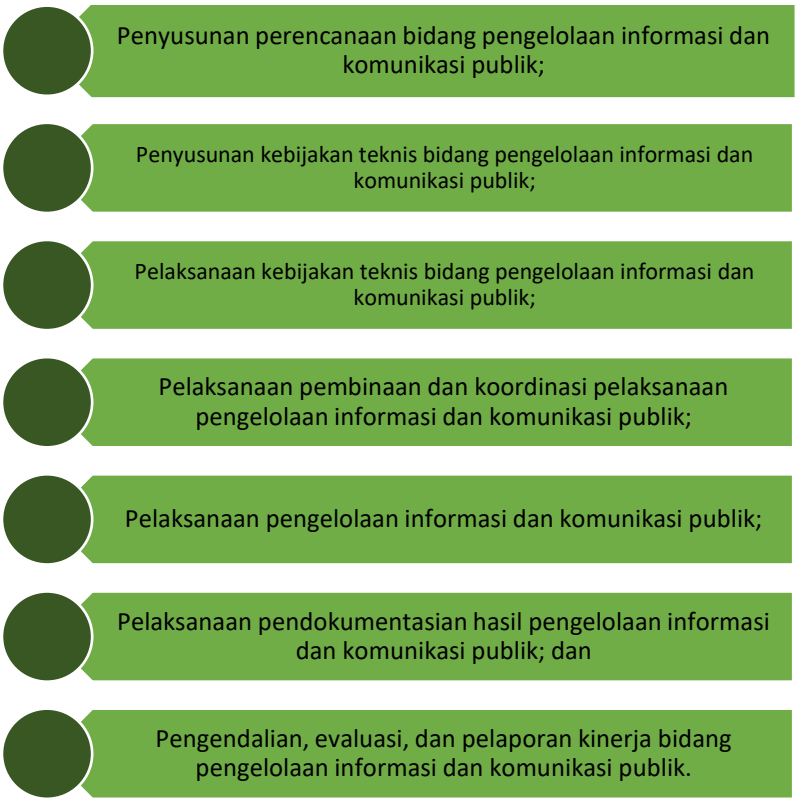

Bidang ini dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Humas Ahli Muda. Adapun tugas Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik adalah sebagai berikut:

a. Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;

b. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
c. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
d. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Layanan *e-Government*

Bidang Layanan *e-Government* mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Layanan *e-Government*. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Layanan *e-Government* mempunyai fungsi :

- Penyusunan perencanaan bidang layanan e-*government*;
- Penyusunan kebijakan teknis bidang layanan *e-government*;
- Pelaksanaan kebijakan teknis bidang layanan *e-government*;
- Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan layanan *e-government*;
- Pelaksanaan pelayanan *e-government*;
- Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan telematika; dan
- Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang pelayanan *e-government*.

Bidang ini dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda dan Perekayasa Ahli Muda. Adapun tugas Kepala Bidang Layanan *e-Government* adalah sebagai berikut:

a. Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang layanan e-government;
b. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang layanan e-government;
c. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang layanan e-government;
d. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang layanan e-government; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Statistik

Bidang Statistik mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang statistik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Statistik mempunyai fungsi :

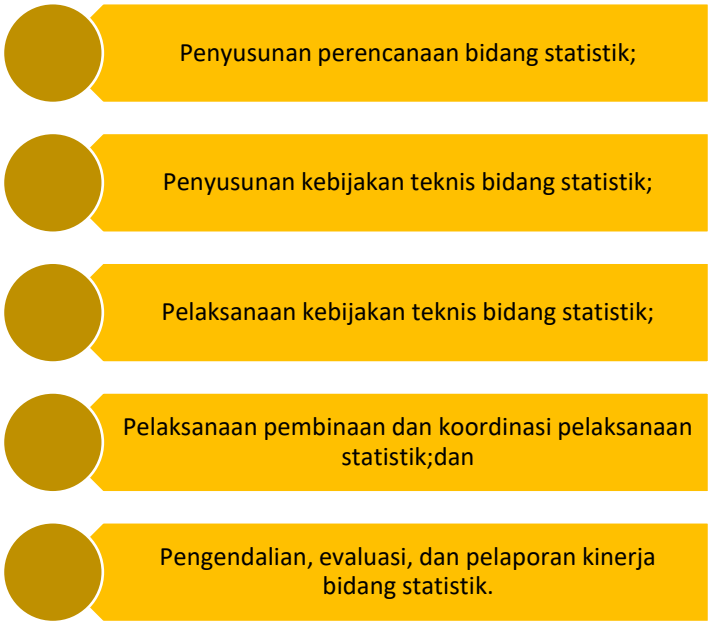

Bidang ini dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional Statistisi Ahli Muda. Adapun tugas Kepala Bidang Statistik adalah sebagai berikut:

a. Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang statistik;
b. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang statistik;
c. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang statistik;
d. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang statistik; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi perlu disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas yang menggambarkan antara pimpinan dan stafnya, sekaligus kepada siapa tanggung jawab harus diberikan. Struktur organisasi menjelaskan dari mana tugas/perintah diterima, kepada siapa tanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugas itu diberikan. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya over lapping dalam pelaksanaan tugas. Struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan dapat dilihat pada gambar 2.1.

GAMBAR 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

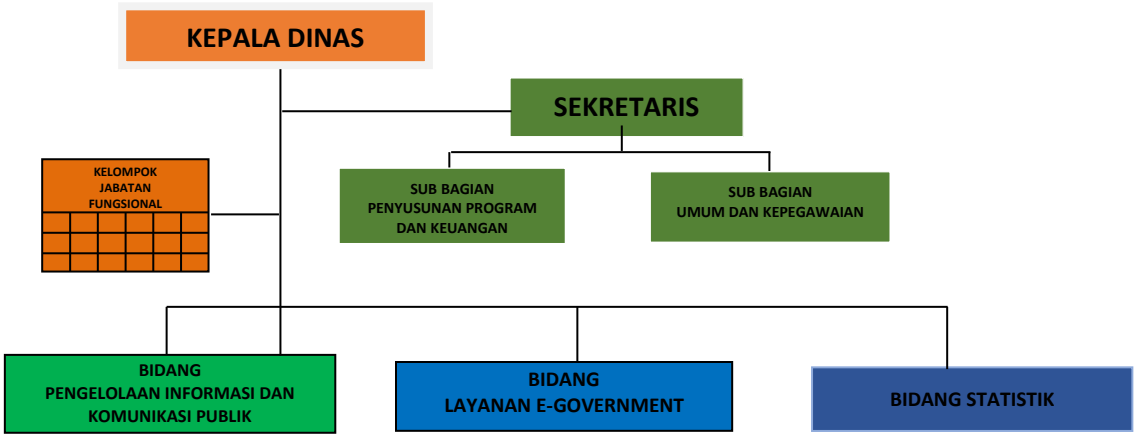

2.1.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Dalam menjalankan fungsi untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik di dukung oleh 34 ASN dengan komposisi PNS 30 orang dan PPPK 4 orang. Adapun jumlah pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Data Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statiatik Kota Pasuruan

No	Uraian	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kondisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan			
	SMA	1	2	3
	Diploma I/II/III/IV	5	1	6
	Sarjana (S1)	16	4	20
	Magister (S2)	3	2	5
2	Kondisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan			
	PNS :			
	- Golongan I			
	- Golongan II	6	3	9
	- Golongan III	11	3	14
	- Golongan IV	4	3	7
	PPPK :			
	- Golongan IX	4	-	4
3	Kondisi Pegawai Berdasarkan Jabatan			
	Eselon II	1	-	1
	Eselon III	2	2	4
	Eselon IV	-	2	2

Sumber : Data Simaskot Tahun 2024

Adapaun asset yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan sampai dengan akhir tahun 2024 sebagai berikut:

Table 2.2 Sarana dan Prasarana
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

No	Kode Barang	Uraian	Nilai Aset
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	1.3.2.01	Alat Besar	771.140.492,00
2.	1.3.2.02	Alat Angkutan	1.215.290.577,00
3.	1.3.2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.655.000,00
4.	1.3.2.05	Alat Kantor fan Rumah Tangga	4.323.258.772,00
5.	1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	4.787.185.021,00
6.	1.3.2.10	Komputer	4.674.072.257,00
7.	1.3.3.01	Bangunan Gedung	2.002.011.994,00
8.	1.3.4.03	Instalasi	27.766.310,00
9.	1.3.4.04	Jaringan	99.737.200,00
10.	1.5.3.01	Aset Tidak Berwujud	1.305.061.600,00
11	1.5.4.01	Aset Lain-Lain	652.461.857,00

Sumber : Rekapitulasi Mutasi Barang Tahun 2024

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan merupakan Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian sebagaimana di atur dalam Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik berperan aktif dalam menyampaikan informasi pembangunan pada masyarakat secara cepat, akurat dan berimbang. Melalui pengelolaan media social resmi, website pemerintah daerah, serta kemitraan dengan media massa. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah dapat diakses oleh public secara luas.

Dalam mendukung transformasi digital, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mengembangkan dan memelihara system informasi pemerintah berbasis elektronik (SPBE). Implementasi aplikasi layanan publik, penguatan infrastruktur jaringan internet menjadi focus utama. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik juga berperan sebagai pengelola pusat data daerah, menjamin keamanan siber, dan memastikan interoperabilitas antar sistem informasi. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik juga berperan sebagai penyedia data yang akurat dan terpercaya. Sehingga Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menjalankan fungsi koordinasi dan integrasi data statistik sektoral melalui penyusunan Data Pokok Pembangunan Daerah, penyusunan buku Profil Kota Pasuruan, pengelolaan Satu Data Kota Pasuruan, serta kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pasuruan sebagai Pembina Data.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan melakukan upaya untuk memfasilitasi terwujudnya *Good Governance* melalui *electronic government* (*e-government*), mengurangi kesenjangan informasi, penyebarluasan informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di bidang TIK, serta melakukan fungsi di bidang statistik dan

persandian. Gambaran pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dapat dibaca pada tebel 2.3 dan tabel 2.4.

Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2021-2024 dapat dikatakan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil capaian sasaran indikator kinerja utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan yaitu:

1. Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik

Indeks keterbukaan informasi dan komunikasi publik merupakan indikator utama sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan. Keterbukaan informasi merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 nilai indeks keterbukaan informasi publik ditergetkan sebesar 90 poin. Pada Tahun 2024 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan mendapatkan nilai indeks keterbukaan informasi publik sebesar 94,74 poin termasuk dalam kategori “Informatif”. Dengan perolehan nilai tersebut, tingkat capaian indikator meningkat sebesar 105,27%. Sehingga pemenuhan indikator sampai dengan akhir rencana strategis Tahun 2026 sudah terpenuhi. Capaian ini didukung oleh komitmen perangkat daerah untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Untuk mendukung keberhasilan kinerja sasaran meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan melaksanakan kerjasama dengan beberapa media berbayar untuk mengoptimalkan penyebaran informasi. Selain itu, penyebaran informasi dilakukan oleh media resmi Pemerintah dan Perangkat Daerah.

Tabel 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA PASURUAN

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	-	-	-	20	60	70	80	80	32,11	43,87	39,90	94,74	80	160,5	73,12	57	118,4	100
2	Persentase data statistik yang terintegrasi	-	-	-	60	60	65	70	75	84,84	65,09	83,72	100	75	141,4	108,5	128,8	142,8	100
3	Indeks Tata Kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	-	-	-	2,2	2,6	2,7	2,8	2,85	1,4	2,0	2,9	3,40	2,85	63,64	76,92	107,4	121,4	100
4	Indeks Layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	-	-	-	2,8	2,6	2,7	2,8	2,85	2,37	3,43	4,38	4,70	2,85	84,64	131,9	162,2	167,8	100
5	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo		✓		-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
6	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		✓		-	-	-	-	-	73,08	76,92	90	2,86	2,86	-	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		✓		-	-	-	-	-	70,07	77,29	64,59	83,13	83,13	-	-	-	-	-
8	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		✓		-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
9	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		✓		-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
10	Tingkat keamanan informasi pemerintah		✓		-	-	-	-	-	100	78,91	78,91	78,91	78,91	-	-	-	-	-
11	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available		✓		-	-	-	-	-	50	99,40	100,09	100	100	-	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	to frontline service delivery units)																		
12	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)		✓		-	-	-	-	-	54,55	45.45	100	100	100	-	-	-	-	-

Tabel 2.4
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA PASURUAN

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.927.662.431	4.908.100.368	5.514.738.199	5.905.753.417	6.028.646.997	3.707.477.900	4.708.741.560	5.109.680.640	5.790.647.147	6.028.646.997	94,39	95,94	92,65	98,05	100		
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	3.328.312.511	3.739.136.639	4.706.843.799	3.044.558.700	1.892.302.006	3.011.511.781	3.584.095.713	4.372.913.476	2.917.277.783	1.892.302.006	90,48	95,85	92,91	95,82	100		
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	6.604.114.509	9.188.401.808	11.721.112.580	8.895.463.360	7.811.057.700	6.436.985.830	8.821.029.720	11.391.465.546	8.720.287.328	7.811.057.700	97,47	96,00	97,19	98,03	100		
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	153.592.100	453.359.730	345.144.480	304.607.000	212.897.400	146.764.500	445.240.920	340.438.350	293.975.338	212.897.400	95,55	98,21	98,64	96,51	100		
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	-	89.407.640	108.928.920	42,275,800	81.657.400	-	65.677.675	100.467.988	34.642.600	81.657.400	-	73,46	92,23	81,94	100		

2. Terwujudnya Satu Data Pembangunan Kota Pasuruan

Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan merupakan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan dengan indikator Persentase data statistik yang terintegrasi. Pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Persentase data statistik yang terintegrasi ditergetkan sebesar 80%. Pada Tahun 2024 Persentase data statistik yang terintegrasi sebesar 100%. Dengan perolehan nilai tersebut, tingkat capaian indikator ini adalah 125%. Capaian ini didukung oleh telah ditetapkannya SKB (Surat Keputusan Bersama) daftar data prioritas Tahun 2024. Sehingga indikator dan elemen data yang dikumpulkan tidak berubah-ubah ataupun bertambah. Selain itu, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik telah memberikan pelatihan kepada SDM Pengolah Data pada masing-masing Perangkat Daerah. sehingga SDM Perangkat Daerah dapat memilah serta mengunggah data indikator Perangkat Daerah terkait pada website Satu Data Kota Pasuruan secara berkala.

3. Meningkatnya maturitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Meningkatnya maturitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan dengan indikator Indeks Tata Kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE dan Indeks Layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE. Indeks SPBE merupakan nilai capaian pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 nilai Indeks Tata Kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE dan Indeks Layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE ditergetkan sebesar 3,40 poin. Pada Tahun 2024 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan mendapatkan nilai Indeks Tata Kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE sebesar 2,90 dan Indeks Layanan SPBE terhadap Nilai Indeks

SPBE sebesar 4,70 poin. Dengan perolehan nilai tersebut, tingkat capaian indikator ini adalah 117,24% dan 162,07%.

Capaian ini didukung oleh adanya Perencanaan Strategis SPBE Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Inovasi Proses Bisnis SPBE yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kota Pasuruan. Pada aspek teknologi informasi dan komunikasi terdapat adanya teknologi informasi dan komunikasi pembangunan aplikasi SPBE dan layanan pusat data serta pada aspek penyelenggara spbe terdapat tim koordinasi SPBE instansi pusat/pemerintah daerah. Selain itu, adanya layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan keuangan, layanan pengadaan barang dan jasa, layanan kepegawaian, layanan kearsipan dinamis, layanan akuntabilitas kinerja organisasi dan layanan kinerja pegawai pada aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Pada aspek layanan publik berbasis elektronik ini dapat terlihat adanya layanan publik berbasis elektronik layanan pengaduan pelayanan publik, layanan data terbuka, layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (jdih), layanan publik sektor 1, layanan publik sektor 2 dan layanan publik sektor 3. Pencapaian ini membawa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memperoleh nilai evaluasi kota cerdas (*Smart City*) sebesar 3,23 termasuk dalam kategori “tinggi”.

Dalam pelaksanaan tugas selama periode berjalan, terdapat sejumlah capaian kerja yang berhasil direalisasikan meskipun tidak tercantum secara eksplisit dalam sasaran kinerja utama yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan inisiatif, fleksibilitas, dan komitmen tinggi terhadap peningkatan mutu layanan dan efisiensi kerja. Pencapaian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan Radio Ramapati

Radio Ramapati merupakan radio milik Pemerintah Kota Pasuruan. Sebagai radio pemerintah, Ramapati berperan aktif dalam menyampaikan informasi pembangunan, kebijakan daerah, serta aspirasi masyarakat melalui siaran yang interaktif dan inklusif. Selain melaksanakan kegiatan rutin tersebut, juga memberikan layanan langsung kepada masyarakat berupa penerbitan Surat Keterangan Kehilangan, dialog interaktif dengan instansi baik pemerintah maupun swasta, promosi produk UMKM, *live streaming* kegiatan pemerintahan, dan Sekolah di Radio menjadi wadah edukasi dan partisipasi public yang efektif.

b. Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik adalah layanan yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dari badan publik. Badan Publik pada Pemerintah Daerah adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. PPID atau PPID utama adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi publik. PPID Pembantu adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. Tugas PPID adalah merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi. Fungsi PPID adalah penghimpunan, penataan dan penyimpanan informasi publik dari seluruh unit kerja di badan publik.

c. Fasilitasi Papan Baca

Dalam upaya meningkatkan literasi masyarakat dan memperluas akses terhadap informasi, Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memfasilitasi penyediaan papan baca di ruang-ruang publik strategis. Program ini merupakan wujud nyata

komitmen Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam menciptakan ekosistem literasi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

d. Peliputan Agenda Pemerintahan

Peliputan agenda pemerintah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik, peliputan agenda pemerintah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan secara konsisten melaksanakan tugas peliputan berbagai kegiatan strategis pemerintah daerah, mulai dari rapat koordinasi, kunjungan kerja, hingga peluncuran program unggulan. Peliputan dilakukan secara profesional dan menyeluruh, mencakup aspek visual, naratif, dan dokumentatif. Tim peliputan hadir langsung di lokasi kegiatan untuk mengabadikan momen-momen penting, melakukan wawancara dengan pejabat terkait, serta menyusun laporan berita yang informatif dan mudah dipahami oleh publik.

e. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan ujung tombak komunikasi publik yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. Merupakan upaya untuk memberdayakan lembaga komunikasi sosial yang berbasis kelompok masyarakat dengan tugas untuk mengumpulkan, mengolah dan menyebarluaskan informasi khususnya yang berkenaan dengan potensi wilayah sekitarnya, sekaligus menjadi ruang edukasi, advokasi, dan pemberdayaan komunitas lokal.

f. Layanan Internet Madinah Van Java

Layanan ini menyediakan akses internet untuk instansi pemerintah dan masyarakat. Penyediaan layanan internet madinah van java tersebar di 41 titik akses di perangkat daerah, 34 titik akses di kelurahan, 8 titik akses di puskesmas, 29 titik akses di puskesmas pembantu, 224 titik akses di RWNet, 57 titik akses di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, 21

titik akses di area publik, dan 41 titik akses di daerah dengan kategori lainnya.

g. Layanan Pengaduan

Layanan pengaduan masyarakat adalah sistem yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, saran, dan pengaduan terkait pelayanan publik melalui berbagai saluran. Kota Pasuruan menyediakan 3 portal pengaduan yaitu SP4N-Lapor!, e-Sambat, dan *call center* 112. SP4N-Lapor! merupakan layanan pengaduan yang terpadu secara nasional. Sedangkan e-sambat merupakan layanan pengaduan lokal di wilayah Kota Pasuruan untuk solusi yang lebih mudah, cepat dan transparan. Selain itu, Pemerintah Kota Pasuruan menghadirkan *call center* 112 yang merupakan layanan panggilan darurat gratis yang siap membantu masyarakat 24 jam.

h. Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi

Layanan pembuatan dan pengembangan aplikasi adalah proses merencanakan, mendesain, membuat, menguji, dan meluncurkan aplikasi perangkat lunak untuk berbagai kebutuhan proses bisnis Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Pasuruan.

i. Layanan Keamanan Siber

Layanan keamanan siber (cyber security services) adalah layanan untuk melindungi sistem komputer, jaringan, aplikasi, dan data dari ancaman siber, seperti peretasan, malware, dan serangan lainnya. Layanan ini membantu mengurangi risiko kerugian finansial, reputasi, dan pelanggaran data.

j. Pemanfaatan Data Statistik Bagi Perencanaan Pembangunan

Suatu kegiatan dengan memanfaatkan data statistik dasar untuk mengukur indikator kinerja perencanaan pembangunan dan mengumpulkan

serta mengolah data sektoral untuk bahan pengendalian dalam informasi perencanaan pembangunan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan adalah kelompok orang, pelanggan, atau orang yang menerima manfaat langsung dari suatu layanan atau program. Kelompok ini memiliki karakteristik yang sama atau relevan dengan layanan yang diberikan.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan memiliki beberapa layanan yang diberikan untuk masyarakat atau stakeholder vertical. Layanan tersebut antara lain pelayanan informasi publik, pelayanan pengelolaan komunikasi publik dan media, pelayanan satu data, pelayanan internet, pelayanan keamanan informasi, pelayanan website, pelayanan ruang digital (fasilitasi zoom, videotron, dll). Kelompok sasaran dari layanan tersebut antara lain masyarakat atau wisatawan Kota Pasuruan, komunitas informasi masyarakat (KIM), media, dan perangkat daerah/instansi vertikal.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan melaksanakan pengelolaan teknologi informasi yang meliputi telekomunikasi, dunia penyiaran (broadcasting) dan internet. Saat ini teknologi informasi adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Sehingga dalam 5 tahun kedepan perlu diprioritaskan pembangunan dan pengembangan teknologi informasi agar masyarakat dapat memperoleh kemudahan dalam memanfaatkan dunia digital.

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Dalam melaksanakan pencapaian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, terdapat beberapa permasalahan yang digambarkan pada Tabel 2.5

Tabel 2.5
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Masalah pokok	Masalah	Akar masalah
1.	Kurangnya Literasi Digital dan Keterampilan	Kurangnya pemahaman tentang teknologi digital dapat menghambat penerimaan dan penggunaan solusi digital	Tidak semua anggota organisasi atau masyarakat memiliki literasi digital yang cukup atau keterampilan teknologi yang diperlukan.
2.	Integrasi Sistem yang Rumit	Adanya aplikasi pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah	Keterbatasan akses dengan aplikaksi pusat dan sistem yang tidak fleksibel
3.	Ancaman keamanan siber	Meningkatnya ancaman keamanan siber	Keamanan siber menjadi sangat penting seiring meningkatnya ketergantungan pada teknologi digital
4.	Infrastruktur TIK yang kurang memadai	Beberapa sarana dan prasarana TIK membutuhkan upgrade untuk mendukung transformasi digital	Kurangnya pemahaman akan transformasi digital dan keterbatasan anggaran
5.	Hasil anaslisa data kurang akurat	Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola data statistik	Keterbatasan SDM yang berlatar belakang ilmu statistik atau yang relevan
6.	Regulasi tidak relevan dengan perkembangan teknologi	Penerapan regulasi yang kurang kuat dibidang teknologi seringkali membuat beberapa pelanggaran atau ketidaksesuaian terjadi diruang digital	Regulasi yang ada belum bisa mengimbangi kecepatan perkembangan teknologi

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar. Dalam era digital yang semakin dinamis, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memiliki peran sentral dalam mendorong transformasi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Namun, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius agar visi dan misi Pemerintah Kota Pasuruan dapat tercapai secara optimal.

Di tengah laju transformasi digital yang semakin cepat, dunia menghadapi serangkaian isu strategis yang saling berkaitan dan berpotensi menghambat kemajuan global. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan digital yang masih lebar antara negara maju dan berkembang, serta antara wilayah urban dan rural. Ketimpangan ini tidak hanya menciptakan ketidaksetaraan akses terhadap teknologi, tetapi juga menurunkan peluang digital bagi kelompok yang terpinggirkan, menghambat partisipasi mereka dalam ekonomi digital dan pendidikan berbasis teknologi.

Di sisi lain, banyak negara dan institusi telah mengembangkan aplikasi pusat untuk layanan publik dan koordinasi data. Namun, ketidakefektifan aplikasi pusat baik dari segi interoperabilitas, user experience, maupun keandalan sistem telah menyebabkan fragmentasi informasi dan rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem digital pemerintah. Sementara itu, ancaman keamanan siber global terus meningkat, dengan serangan yang semakin kompleks dan terkoordinasi lintas negara. Infrastruktur kritis, data pribadi, dan sistem pemerintahan menjadi target utama, menuntut respons global yang lebih tangguh dan kolaboratif dalam menghadapi risiko siber yang bersifat transnasional.

Dalam konteks krisis global baik pandemi, bencana alam, maupun konflik geopolitik pengelolaan komunikasi krisis terbukti masih belum optimal. Ketidakterpaduan pesan, lambatnya respons informasi, dan kurangnya transparansi sering kali memperburuk dampak krisis dan menimbulkan kepanikan publik. Terakhir, pengawasan terhadap data statistik sebagai fondasi pengambilan keputusan strategis juga belum maksimal. Ketidakakuratan, keterlambatan, dan kurangnya integrasi data lintas sektor menghambat formulasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), serta memperlemah daya saing dan ketahanan nasional.

Transformasi digital global telah membuka peluang besar bagi kemajuan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Namun, berbagai isu strategis global seperti kesenjangan digital, ketidakefektifan aplikasi pusat, meningkatnya ancaman keamanan siber, lemahnya komunikasi krisis, dan pengawasan data statistik yang belum optimal, turut menciptakan tekanan dan tantangan yang dirasakan secara langsung di tingkat nasional dan daerah.

Sebagai ujung tombak implementasi kebijakan, daerah memiliki peran krusial dalam menjawab tantangan nasional dan global. Hasil telaah terhadap Isu-Isu Strategis berskala internasional/Global yang erat kaitannya dengan pembangunan Kota Pasuruan di masa mendatang utamanya yang berkaitan dengan Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah berikut ini :

Tabel 2.6 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasaahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Urusan Komunikasi dan Informatika	Kurangnya pemahaman tentang teknologi digital dapat menghambat penerimaan dan penggunaan solusi digital	Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan tata kelola pemerintah dan layanan publik yang bermutu	Kesenjangan digital menurunkan peluang digital	Pemanfaatan tekonologi digital tidak efektif	Kurangnya keterampilan literasi digital	Pengarusutamaan gender dalam pemanfaatan teknologi digital melalui kecerdasan buatan, analitik data dan teknologi terkini lainnya
Urusan Komunikasi dan Informatika	Adanya aplikasi pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah	Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan tata kelola pemerintah dan	Ketidakefektifan aplikasi pusat	Kurangnya Partisipasi daerah terhadap aplikasi pusat	Kesulitan dalam integrasi data	Peningkatan aplikasi terintegrasi

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasaahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		layanan publik yang bermutu				
Urusan Persandian	Meningkatnya ancaman keamanan siber	Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan tata kelola pemerintah dan layanan publik yang bermutu	Ancaman keamanan siber global semakin meningkat dan kompleks	Memperkuat ketahanan siber nasional dan mengurangi dampak negatif dari serangan siber	Pembangunan infrastruktur keamanan siber	Peningkatan keamanan siber untuk melindungi sistem dan data kritis
Urusan Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya penyebaran disinformasi dan hoaks	Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan tata kelola pemerintah dan layanan publik yang bermutu	Pengelolaan komunikasi krisis belum optimal	Peningkatan pengawasan media sosial	Optimalisasi pemanfaatan Media Sosial untuk penanganan hoaks	Pemanfaatan media sosial secara efektif dalam menyebarkan informasi

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasaahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Urusan Statistik	Rendahnya kualitas data statistik	Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan tata kelola pemerintah dan layanan publik yang bermutu	Pengawasan Data Statistik yang belum optimal	Rendahnya keterpaduan data pusat dan daerah	Kurangnya Pemanfaatan Data untuk Pengambilan Keputusan	Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kualitas data dan analisis statistik

BAB III
TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra Tahun 2025-2029

Dalam membangun Indonesia yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan, Presiden Republik Indonesia menetapkan *Asta Cita*. Delapan cita-cita strategis nasional sebagai arah pembangunan. Berikut adalah delapan asta cita yang dicanangkan pemerintah :

1. Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Nasional;
3. Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan;
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesetaraan Gender;
5. Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Nilai Tambah Ekonomi;
6. Pembangunan dari Desa untuk Pemerataan Ekonomi;
7. Reformasi Politik, Hokum, dan Birokrasi serta Pemberantasan Korupsi dan Narkoba;
8. Harmonisasi Lingkungan, Budaya, dan Toleransi Beragama.

Visi Provinsi Jawa Timur, yaitu *"Bersama Jawa Timur Maju yang Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045"* dengan sembilan misi Nawa Bhakti Satya sejalan dengan semangat Asta Cita. Berikut adalah sembilan misi Nawa Bhakti Satya:

1. Jatim Sejahtera – Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan;
2. Jatim Kerja – Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas;
3. Jatim Akses – Memperkuat Infrastruktur Konektivitas antar Wilayah dan Intra Aglomerasi yang Berkualitas, Modern, Terpadu, dan Berkeadilan;

4. Jatim Agro – Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan;
5. Jatim Cerdas – Memperkuat Akses dan Mutu Pendidikan yang Berkualitas, Merata, dan Berkeadilan;
6. Jatim Sehat – Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas, Merata, Mudak Diakses, dan Berkeadilan;
7. Jatim Berkah Amanah – Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif;
8. Jatim Harmoni – Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif;
9. Jatim Lestasri – Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, Penentuan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan merupakan satu bagian yang terpenting, karena menentukan keterkaitan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam Dokumen RPJMD Kota Pasuruan. Pada RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025 – 2029, Visi Pembangunan yang akan di capai adalah:

PASURUAN ANUGRAH

“Aktif Pelayanan Publiknya, Mandiri Ekonominya, Guyub Warganya dan Indah Kotanya”

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 diatas, maka dihasilkan 5 Misi Pembangunan dari RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :



Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mengampu misi Kepala Daerah yang pertama yaitu **"Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Merata Berbasis Digital"**.

Dalam mewujudkan program tersebut, Dinas Kominfo dan Statistik menyusun perencanaan pembangunan menggunakan Sinstem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. Melalui Reformasi birokrasi diwujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) dan didukung penggunaan teknologi informasi. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan. Termasuk di dalamnya, upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat; pemenuhan dan penempatan SDM aparatur daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya (the right man on the right place); penguatan kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan yang efektif dan

efisien dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi; serta penciptaan iklim birokrasi yang bebas dari KKN.

Guna Mencapai Visi dan Misi diatas, diperlukan suatu tujuan dan Sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan tahun 2025-2029 sebagai perumusan fokus program/kegiatan/sub kegiatan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya. Adapun tujuannya adalah :

1. Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan
   Indikatornya adalah : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sedangkan sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tata Kelola Digitalisasi Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Layanan Digitalisasi Pelayanan Publik

Indikator sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan tahun 2025-2029 sebagai berikut :

- Sasaran 1 memiliki indikator : Nilai Domain Tata Kelola SPBE
- Sasaran 2 memliki indikator : Nilai Domain Layanan SPBE

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 3.1 sebagaimana berikut :

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD

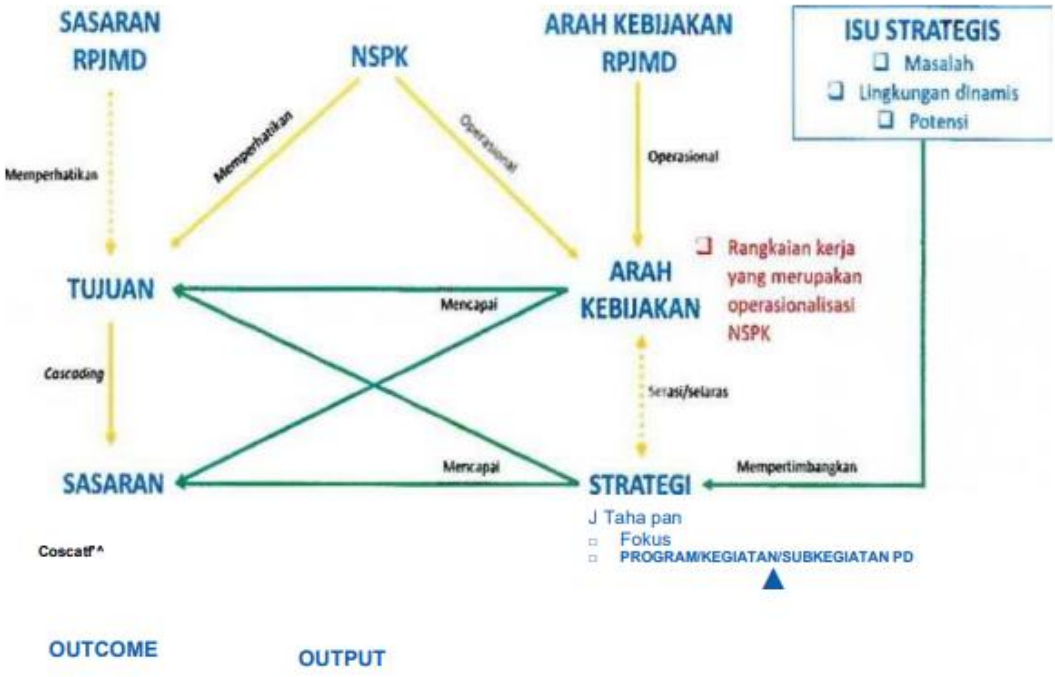

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

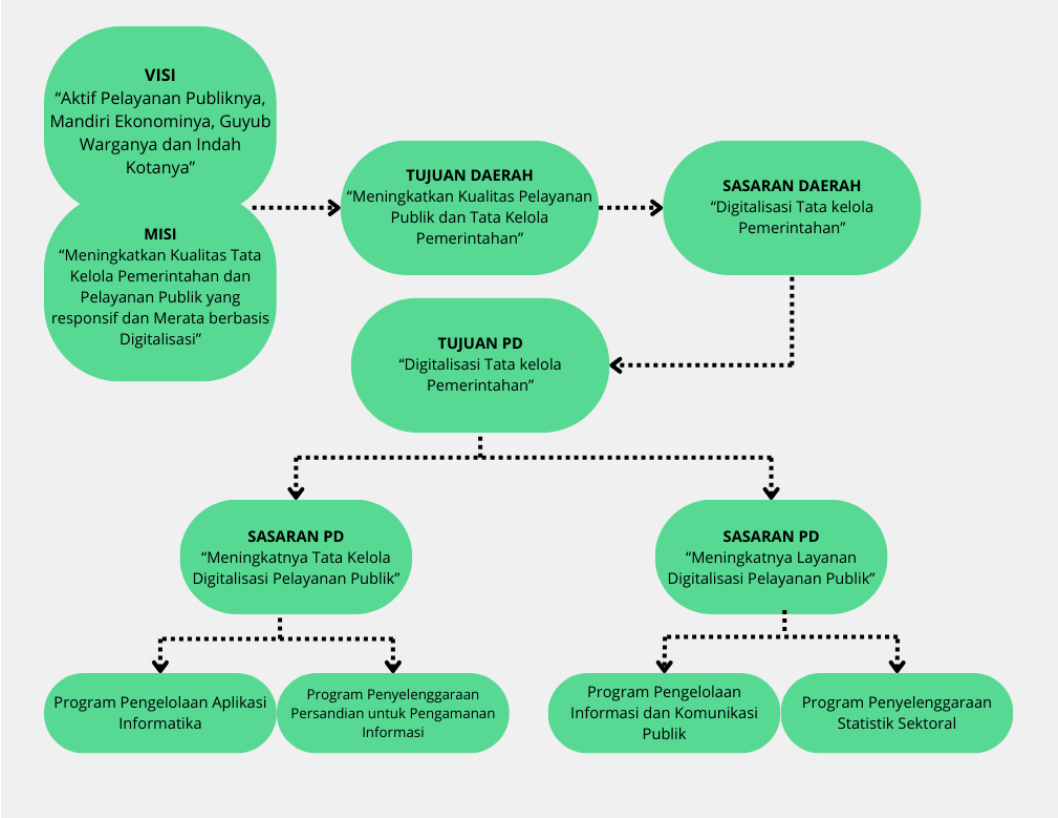

Tabel 3.1
TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,08	1,71-1,96	1,81-2,1	1,91-2,25	2,01-2,39	2,11-2,54	Target sesuai surat kementerian PAN dan RB No. B/ 66/PD.02/2025 tentang Pembinaan kepada Instansi Pemerintah pada Tahun 2025 dalam Rangka Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital sebagai Penguatan Kebijakan SPBE dan surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur No.000.7.2.2/14242/201.2/2025 tentang Pemutakhiran Penyelarasan Indikator Sasaran Pembangunan dan IUP pada RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029
		Meningkatnya Tata Kelola Digitalisasi Pelayanan Publik	Nilai Domain Tata Kelola SPBE	3,42	1,8	1,85	1,95	2,1	2,2	
		Meningkatnya Layanan Digitalisasi Pelayanan Publik	Nilai Domain Layanan SPBE	4,73	1,8	1,85	1,95	2,1	2,2	

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada RPJMD Kota Pasuruan tahun 2025-2029. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menerapkan strategi dan arah kebijakan, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Stataistik Kota Pasuruan mengklasifikasi dan melakukan identifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.2
PENAHAPAN RENSTRA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK TAHUN 2025-2029

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
Penyusunan pedoman tata kelola dan manajemen pemerintah digital	Evaluasi implementasi pemerintah digital	Reviu pedoman tata kelola dan manajemen pemerintah digital	Evaluasi implementasi pemerintah digital	Penerapan kriptografi nasional untuk keamanan data
Pemanfaatan sistem penghubung layanan daerah	Pemanfaatan teknologi baru	Peningkatan kapabilitas penanganan insiden siber	Pelaksanaan evaluasi tingkat kesiapan pengamanan informasi	Peningkatan keamanan aplikasi digital
Peningkatan tindak lanjut pengaduan SP4N-Lapor!	Peningkatan keamanan aplikasi digital	Peningkatan pemanfaatan SP4N-Lapor! sebagai kanal pengaduan masyarakat	Penerapan keterbukaan informasi sampai dengan Kelurahan	Peningkatan pemanfaatan SP4N-Lapor! sebagai kanal pengaduan masyarakat
Pemetaan Metadata dan Romantik BPS	Sinkronisasi data statistik sektoral	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Pemanfaatan data geospasial	Sinkronisasi data sektoral dan data geospasial

Tabel 3.2
ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK TAHUN 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan melalui peningkatan infrastruktur digital	
2.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat dan responsif gender	
3.	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 tahun 2019 Tentang Norma , Standar , Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi untuk peningkatan pengambilan keputusan berdasarkan data	
4.	Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah daerah	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Peningkatan penanganan insiden siber untuk menjaga kerahasiaan data	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Strategi dan arah Kebijakan yang telah disusun selanjutnya ditetapkan sejumlah program dan kegiatan sehingga terbentuk kerangka rencana kerja yang sistematis antara visi dan misi, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan. Dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan berorientasi terhadap sasaran yang diharapkan dapat dicapai dalam periode tahun 2025 hingga tahun 2030. Program tahun 2030 merupakan upaya kesinambungan perencanaan yang berkelanjutan, dengan tujuan untuk mencapai target strategis dan meningkatkan digitalisasi tata kelola pemerintahan. Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN RENSTRA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan	**Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan**				**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**		
		Meningkatnya Tata Kelola Digitalisasi Pelayanan Publik			**Nilai Domain tata kelola SPBE**		
		Meningkatnya Layanan Digitalisasi Pelayanan Publik			**Nilai Domain Layanan SPBE**		
			Terlaksananya Pengelolaaan Aplikasi Informatika		**Persentase aplikasi yang terintegrasi**	**Program pengelolaan Aplikasi informatika**	
				Meningkatnya pengelolaan	Persentase ketercapaian pengelolaan e-government di	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
				e-government di lingkup Pemerintah Kota Pasuruan	lingkup Pemerintah Kota Pasuruan		
				Terlaksananya pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Sub Kegiatan Koordinasi Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, serta Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
				Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet	
				Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Tata Kelola SPBE Meliputi Arsitektur, Peta Rencana, Proses Bisnis, Serta	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
				arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Penyusunan Rencana Dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
			Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi		**Persentase penanganan serangan siber yang ditindaklanjuti tepat waktu**	**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	
				Teselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan insiden keamanan informasi yang telah ditindaklanjuti	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
			Terlaksananya Pengelolaan		**Persentase Implementasi**	**Program Pengelolaan**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
			informasi dan Komunikasi Publik		**keterbukaan informasi publik** **Persentase Tindak lanjut pengaduan yang masuk**	**Informasi dan Komunikasi Publik**	
				Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi pembangunan yang dipublikasikan	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Sub Kegiatan Relasi Media	
				Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang Aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
				Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	
				Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
				Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/ juknis	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
				Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Sub Kegiatan Penyusunan Konten	
				Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
					bimtek/pelatihan		
			Terselenggaranya Statistik Sektoral		**Persentase data statistik sektoral yang dipublikasi**	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	
				Terselenggaranya Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data statistik sektoral yang diunggah di website	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Sub Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	
				Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Sub Kegiatan Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
				Meningkatnya Kualitas Statistik Sektora	Persentase kegiatan statistik	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
					sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data		
				Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Sub Kegiatan Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
				Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
				Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	Sub Kegiatan Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	

Tabel 4.2
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGUINDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.16 - Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika				15.677.420.911		15.517.537.773		17.305.437.145		18.018.958.805		19.150.661.718	
2.16.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75,3	76,9	6.007.023.361	78,5	5.600.765.377	80,1	5.833.600.056	81,7	5.683.950.349	83,3	5.624.951.562	
	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	0	3		3		3		3		3		
2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	80	90	6.176.200	90	5.743.866	90	5.973.620	90	5.794.410	90	5.736.465	
2.16.01.2.01.0001 – Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	6	3.947.700	6	3.671.361	6	3.818.215	6	3.703.668	6	3.666.631	
2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	8	6	2.228.500	6	2.072.505	6	2.155.405	6	2.090.742	6	2.069.834	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGUINDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Kinerja SKPD												
2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	80	90	5.135.618.867	90	4.790.364.898	90	4.990.785.965	90	4.866.418.689	90	4.817.751.201	
2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34	34	5.108.751.567	32	4.765.378.309	32	4.964.799.913	32	4.841.212.219	32	4.792.796.796	
2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14	14	26.867.300	13	24.986.589	13	25.986.052	13	25.206.470	13	24.954.405	
2.16.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	70	90	11.242.100	90	10.455.153	90	10.873.359	90	10.547.157	90	10.441.685	
2.16.01.2.03.0001 – Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	1.032.500	2	960.225	2	998.634	2	968.674	2	958.987	
2.16.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	10.209.600	4	9.494.928	4	9.874.725	4	9.578.483	4	9.482.698	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGUINDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	70	90	16.223.600	90	15.087.948	90	15.691.465	90	15.220.721	90	15.068.513	
2.16.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	4	2.223.600	4	2.067.948	4	2.150.665	4	2.086.145	4	2.065.283	
2.16.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	2	14.000.000	2	13.020.000	2	13.540.800	2	13.134.576	2	13.003.230	
2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	85	90	172.514.500	90	160.438.485	90	166.856.022	90	161.850.339	90	158.072.560	
2.16.01.2.06.0001 – Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	2	6.300.000	2	5.859.000	2	6.093.360	2	5.910.559	2	5.851.453	
2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	4.283.500	4	3.983.655	4	4.143.001	4	4.018.710	4	3.978.522	
2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	2	1	2.204.400	1	2.050.092	1	2.132.095	1	2.068.132	1	2.047.450	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGUINDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perundang-undangan	Undangan yang Disediakan												
2.16.01.2.06.0007 – Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	0	1	4.105.800	1	3.818.394	1	3.971.129	1	3.851.995	1	3.813.475	
2.16.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	4	5.620.800	4	5.227.344	4	5.436.437	4	5.273.343	4	5.220.609	
2.16.01.2.06.0009 – Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125	95	150.000.000	80	139.500.000	88	145.080.000	85	140.727.600	82	137.161.051	
2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	85	90	45.863.096	90	42.652.679	90	44.358.785	90	43.028.021	90	42.597.739	
2.16.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	64	37.965.800	60	35.308.194							
2.16.01.2.07.0006 – Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	1	7.897.296	1	7.344.485	3	44.358.785	3	43.028.021	3	42.597.739	
2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	85	90	379.619.000	90	353.039.970	90	367.159.168	90	356.146.392	90	352.588.227	
2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	2.490.000	12	2.310.000	12	2.400.000	12	2.330.000	12	2.310.000	
2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12	12	178.586.200	12	166.085.166	12	172.728.572	12	167.546.714	12	165.871.246	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGUINDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan												
2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	198.542.800	12	184.644.804	12	192.030.596	12	186.269.678	12	184.406.981	
2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	70	90	239.765.998	90	222.982.378	90	231.901.672	90	224.944.620	90	222.695.172	
2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	36.396.000	1	33.848.280	1	35.202.211	1	34.146.144	1	33.804.682	
2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	16	122.367.998	14	113.802.238	14	118.354.327	14	114.803.697	14	113.655.660	
2.16.01.2.09.0006 – Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	65	43.370.000	40	40.334.100	41	41.947.464	40	40.689.040	40	40.282.149	
2.16.01.2.09.0009 -	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	1	37.632.000	1	34.997.760	1	36.397.670	1	35.305.739	1	34.952.681	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGUINDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/ Direhabilitasi												
2.16.02 - Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Tindak lanjut pengaduan yang masuk	100	100	2.023.832.750	100	2.023.832.750	100	2.872.330.924	100	3.355.793.386	100	3.648.573.579	
	Persentase Implementasi keterbukaan informasi publik	54,67	70		85		100		100		100		
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi pembangunan yang dipublikasikan	91,11	92	2.023.832.750	92,5	2.023.832.750	93	2.872.330.924	93,5	3.355.793.386	94	3.648.573.579	
2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	-	4	846.117.100	4	973.034.665	4	1.383.735.094	4	1.773.898.821	4	1.951.288.703	
2.16.02.2.01.0015 – Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang Aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	13	16	13.450.700	17	15.468.305	18	17.015.135	19	18.716.648	20	20.588.312	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGUINDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai Peraturan perundangan	0	6	50.253.600	6	57.791.640	6	63.570.804	6	69.927.884	6	76.920.672	
2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-	2	369.626.700	2	425.070.705	2	446.324.240	2	468.640.452	2	492.072.474	
2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2	2	550.635.750	2	633.231.113	2	664.892.671	2	698.137.304	2	733.044.169	
2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	-	4	193.748.900	4	222.811.235	4	245.092.358	4	269.601.593	4	312.101.497	
2.16.02.2.01.0024 – Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/ pelatihan	0	0	-	41	47.000.566	4	51.700.622	41	56.870.684	41	62.557.752	
2.16.03 - Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi yang terintegrasi	40	52	7.646.564.800	64	7.542.364.167	76	8.599.506.165	88	8.979.215.070	100	9.877.136.577	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGUINDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Kota Pasuruan	-	75	7.646.564.800	80	7.542.364.167	85	8.599.506.165	85	8.979.215.070	90	9.877.136.577	
2.16.03.2.02.0032 – Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	20	20	1.338.320.600	20	1.320.079.290	20	1.600.000.000	20	1.759.708.905	20	1.935.679.795	
2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	418	455	6.127.790.800	455	6.044.291.058	455	6.699.506.165	455	6.899.506.165	455	7.614.456.782	
2.16.03.2.02.0037 – Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran	1	1	180.453.400	1	177.993.819	1	300.000.000	1	320.000.000	1	327.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGUINDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	SPBE Pemerintah Daerah												
2.20 - Urusan Pemerintahan Bidang Statistik				154.221.900		400.372.114		494.794.342		588.573.564		711.446.671	
2.20.02 - Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang dipublikasi	94,56	95	154.221.900	95,25	400.372.114	95,5	494.794.342	95,75	588.573.564	96	711.446.671	
2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data statistik sektoral yang diunggah di website	85,24	86	154.221.900	87	400.372.114	88	494.794.342	89	588.573.564	90	711.446.671	
2.20.02.2.01.0017 – Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	-	-	-	70	45.000.000	75	49.000.000	80	50.000.000	85	52.000.000	
2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data,metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	-	75	131.928.900	80	171.391.214	85	222.808.578	90	265.792.071	95	265.792.071	
2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	-	90	22.293.000	92	28.980.900	94	39.985.764	95	51.981.493	96	100.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGUINDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.20.02.2.01.0020 – Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	-	-	-	80	50.000.000	80	55.000.000	80	60.500.000	80	94.044.600	
2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	-	-	-	75	60.000.000	80	78.000.000	85	101.400.000	90	131.820.000	
2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	-	-	-	1	45.000.000	1	50.000.000	1	58.900.000	1	67.790.000	
2.21 - Urusan Pemerintahan Bidang Persandian				136.540.700		64.696.321		85.834.207		106.529.305		134.287.638	
2.21.02 - Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase penanganan serangan siber yang ditindaklanjuti tepat waktu	79	80	136.540.700	82	64.696.321	85	85.834.207	87	106.529.305	90	134.287.638	
2.21.02.2.01 – Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan insiden keamanan informasi yang telah ditindaklanjuti	-	100	136.540.700	100	64.696.321	100	85.834.207	100	106.529.305	100	134.287.638	
2.21.02.2.01.0005 – Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah	-	12	136.540.700	12	64.696.321	12	85.834.207	12	106.529.305	12	134.287.638	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGUINDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik												

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dalam Rencana Strategis tahun 2025-2029 merencanakan 5 Program, 12 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan yang meliputi indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dijabarkan pada tabel 4.2.

Untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik telah menentukan beberapa sub kegiatan prioritas yang dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.16.2.20.2.21.02.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK				
1.	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Terlaksananya Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
2.	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Terlaksananya Pengelolaaan Aplikasi Informatika	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
			2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	
			2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta	

			penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
3.	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terselenggaranya Statistik Sektoral	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
			2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
			2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
4.	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	

Dalam rangka mendukung digitalisasi tata kelola pemerintahan di Kota Pasuruan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memiliki beberapa indikator kinerja utama yang akan dicapai dan diselenggarakan sesuai dengan Renstra tahun 2025-2029, sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	4,08	1,71-1,96	1,81-2,1	1,91-2,25	2,01-2,39	2,11-2,54	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.	Nilai Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	3,42	1,8	1,85	1,95	2,1	2,2	
3.	Nilai Domain Layanan SPBE	Nilai	4,73	1,8	1,85	1,95	2,1	2,2	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu organisasi atau instansi pemerintah berhasil mencapai tujuan strategisnya. IKK sangat penting dalam sistem perencanaan dan evaluasi kinerja, terutama dalam konteks pemerintahan dan pembangunan daerah. IKK yang akan dicapai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
INDIKATOR KINERJA KUNCI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase Layanan Publik yang diseleng-garakan secara online dan terintegrasi	%	5,71	8,57	11,43	14,29	17,14	20	
3.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui	%	84	84	84	84	84	84	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota								
4.	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	
6.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	79.07	79.22	79.38	79.53	79.69	79.84	
7.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	100	100	100	100	100	100	
8.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	100	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Daerah Kota Pasuruan 2025–2029, disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2025–2029. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan, yang difasilitasi oleh kerangka anggaran APBD Kota Pasuruan. Sekaligus bermanfaat untuk mengevaluasi hasil-hasil kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang telah dilaksanakan.

Prioritas program/kegiatan yang telah di susun berdasarkan relevansi materi RPJMD Kota Pasuruan 2025-2029, diutamakan fasilitasi melalui kerangka anggaran maupun kerangka kebijakan, di samping itu kegiatan non prioritas atau kegiatan reguler tetap dialokasikan untuk mendukung percepatan program/kegiatan yang telah diprioritaskan. Prioritas kegiatan di susun berdasarkan sensitivitas sasaran sektor maupun kontribusinya terhadap capaian kinerja.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus bisa dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat langsung dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu Sumber Daya Manusia merupakan organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

Akhirnya, semoga Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan–tahapan yang telah ditetapkan secara konsisiten dalam rangka mewujudkan good governance guna menuju terwujudnya masyarakat

Pasuruan yang informatif, mandiri dan beretika melalui Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian.

KERTAS KERJA VERIFIKASI
INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
RENSTRA PD TAHUN 2025-2029

No	Nama Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Kumulati/Non Kumulatif	Periode Data	Sumber Referensi
	Tujuan :								
1	Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Indeks SPBE	Nilai	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.	"= Nilai SPBE tahun - n"	KemenpanRB	Non Kumulatif (Nilai Terakhir)	Tahunan	RPJMD dan RENSTRA
	Sasaran :								
1	Meningkatnya Tata Kelola Digitalisasi Pelayanan Publik	Nilai Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	Tata Kelola SPBE merupakan kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu	"= Nilai Domain tata kelola SPBE tahun - n"	KemenpanRB	Non Kumulatif (Nilai Terakhir)	Tahunan	RPJMD dan RENSTRA
2	Meningkatnya Layanan Digitalisasi Pelayanan Publik	Nilai Domain Layanan SPBE	Nilai	Layanan SPBE merupakan keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat	"= Nilai Domain layanan SPBE tahun - n"	KemenpanRB	Non Kumulatif (Nilai Terakhir)	Tahunan	RPJMD dan RENSTRA
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Implementasi keterbukaan informasi publik	%	Pemenuhan informasi publik pada setiap perangkat daerah sesuai daftar informasi publik (DIP) yang telah ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi informasi publik sesuai DIP}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100$	Diskominfotik	Non Kumulatif (Nilai Terakhir)	Tahunan	RPJMD dan RENSTRA
		Persentase Tindak lanjut pengaduan yang masuk	%	Jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti pada kanal SP4N Lapor! dibagi dengan Jumlah pengaduan yang masuk pada kanal SP4N Lapor!	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Pengaduan yang masuk}} \times 100$	Diskominfotik	Non Kumulatif (Nilai Terakhir)	Bulanan	RPJMD dan RENSTRA
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi pembangunan yang dipublikasikan	%	Jumlah informasi yang dipublikasikan tepat waktu di bagi dengan jumlah informasi yang di liput	$\frac{\text{Jumlah informasi yang dipublikasikan tepat waktu}}{\text{jumlah informasi yang di liput}} \times 100$	Diskominfotik	Non Kumulatif (Nilai Terakhir)	Triwulan	RENSTRA

No	Nama Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Kumulati/Non Kumulatif	Periode Data	Sumber Referensi
1	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	laporan	-Relasi dengan media dengan cara: a.membuat siaran pers b.melaksanakan kegiatan dengan media terkait pemberitaan yang meliputi: 1.konferensi pers 2.kunjungan jurnalis/pers 3.kunjungan ke media 4.pertemuan dengan pemimpin redaksi 5.liputan media 6.melakukan klarifikasi pemberitaan c.melaksanakan kegiatan lainnya dengan media terkait pemberitaan dan/ atau non pemberitaan d.mengelola ruang pers e.melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan relasi dengan media - Rumus Penghitungan Indikator: Jumlah aktivitas relasi media kepada media sesuai kritria 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Diskominfotik	Kumulatif	Triwulan	RENSTRA
2	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	komunitas	- Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) meliputi: a.komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pengelolaan dan diseminasi dan/atau b.komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pemberdayaaan Masyarakat serta melakukan pengelolaan dan diseminasi informasi. -Rumus Penghitungan Indikator: Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan Informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Diskominfotik	Non Kumulatif (Nilai Terakhir)	Triwulan	RENSTRA
3	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	permohonan	-Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan perangkat daerah lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik - Pelayanan Informasi Publik adalah kegiatan penyediaan informasi publik -Rumus Penghitungan Indikator: Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Diskominfotik	Kumulatif	Bulanan	RENSTRA
4	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	- Penyusunan konten adalah proses menghasilkan produk dari ide-ide topik agenda komunikasi dalam berbagai bentuk media agar sesuai dengan target khalayak -Rumus Penghitungan Indikator: Jumlah konten yang disusun sesuai strategi komunikasi	Jumlah Konten Informasi Publik	Diskominfotik	Kumulatif	Triwulan	RENSTRA

No	Nama Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Kumulati/Non Kumulatif	Periode Data	Sumber Referensi
5	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	orang	- kegiatan pengembangan kapasitas SDMKP - penyediaan dan pemberian konsultasi kepada individu pengelola informasi dan komunikasi publik. - Rumus Penghitungan Indikator: Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti Bimtek/pelatihan	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Diskominfotik	Kumulatif	Tahunan	RKPD
6	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	rekomendasi	- Monitoring informasi kebijakan, opini, dan aspirasi publik sebagaimana dimaksud dalam meliputi: a.pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah b.pemantauan Isu Publik di media massa dan media sosial c.pengumpulan pendapat umum d.pemantauan aduan masyarakat Dari kegiatan huruf (a), (b), (c) dan (d) akan dilakukan evaluasi Isu yang menghasilkan rekomendasi, dan penyusunan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah. - Rumus Penghitungan Indikator: Jumlah rekomendasi harian	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Diskominfotik	Kumulatif	Tahunan	RENSTRA
7	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	media	Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yaitu saluran informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung Rumus Penghitungan Indikator: Jumlah media komunikasi yang: - dimiliki pemerintah maupun media berbayar -dikelola sesuai dengan kriteria/ dan - dapat diakses oleh khalayak	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Diskominfotik	Non Kumulatif (Nilai Rata2)	Bulanan	RENSTRA
1	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi yang terintegrasi	%	Jumlah aplikasi yang telah terhubung dengan aplikasi pasti (pasuruan terintegrasi) dibagi dengan jumlah aplikasi yang direncanakan terhubung dengan aplikasi pasti (pasuruan terintegrasi)	$\frac{\text{Jumlah aplikasi yang telah terhubung dengan aplikasi pasti (pasuruan terintegrasi)}}{\text{jumlah aplikasi yang direncanakan terhubung dengan aplikasi pasti (pasuruan terintegrasi)}} \times 100$	Diskominfotik	Non Kumulatif (Nilai Terakhir)	Tahunan	RPJMD dan RENSTRA
1	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Kota Pasuruan	%	pengelolaan e-government adalah pelaksanaan digitalisasi layanan pada perangkat daerah.	$\frac{\text{Jumlah digitalisasi layanan pada Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah layanan pada Perangkat Daerah}} \times 100$	Diskominfotik	Non Kumulatif (Nilai Terakhir)	Tahunan	RENSTRA

No	Nama Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Kumulati/Non Kumulatif	Periode Data	Sumber Referensi
1	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Aplikasi	- Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat atau Pemerintah Daerah lain. - rumus perhitungan indikator: Hitung aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Diskominfotik	Kumulatif	Tahunan	RENSTRA
2	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	- Dinas di tingkat Pemerintah Daerah kabupaten/kota menghubungkan jaringan Perangkat Daerah dengan jaringan intra Pemerintah Daerah kabupaten/kota. - rumus perhitungan indikator: Hitung Perangkat Daerah di Pemerintah Kab/kota yang terhubung dengan jaringan intra Pemerintah Daerah Kab/kota	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Diskominfotik	Non Kumulatif (Nilai Terakhir)	Triwulan	RENSTRA
3	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Dokumen	-Arsitektur SPBE pemerintah daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. -Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. -Rumus Perhitungan Indikator: Hitung Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan, yang telah disusun	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Diskominfotik	Non Kumulatif (Nilai Terakhir)	Tahunan	RENSTRA
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang di publikasi	%	Data statistik sektoral yang di publikasi pada satudata untuk masyarakat umum	$\frac{\text{Jumlah data statistik sektoral yg dipublikasi}}{\text{jumlah daftar data statistik sektoral}} \times 100$	Diskominfotik	Non Kumulatif (Nilai Terakhir)	Triwulan	RPJMD dan RENSTRA
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data statistik sektoral yang diunggah di website	%	Data statistik sektoral yang di publikasi pada satudata untuk internal pemerintah Kota Pasuruan	$\frac{\text{Jumlah data statistik sektoral yg di kelola di website}}{\text{Jumlah daftar data statistik sektoral}} \times 100$	Diskominfotik	Non Kumulatif (Nilai Terakhir)	Bulanan	RENSTRA

No	Nama Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Kumulati/Non Kumulatif	Periode Data	Sumber Referensi
1	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	%	kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik / Jumlah kegiatan statistik sektoral x 100	Diskominfotik	Non Kumulatif (Nilai Terakhir)	Tahunan	RENSTRA
							Non Kumulatif (Nilai Terakhir)	Triwulan	RENSTRA
2	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	%	kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk / Jumlah kegiatan statistik sektoral x 100	Diskominfotik	Non Kumulatif (Nilai Terakhir)	Triwulan	RENSTRA
							Non Kumulatif (Nilai Terakhir)	Triwulan	RENSTRA
3	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	%	kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data / Jumlah kegiatan statistik sektoral x 100	Diskominfotik	Non Kumulatif (Nilai Terakhir)	Triwulan	RENSTRA
							Non Kumulatif (Nilai Terakhir)	Triwulan	RENSTRA
4	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	dokumen	pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Diskominfotik	Non Kumulatif (Nilai Terakhir)	Tahunan	RENSTRA
5	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	dokumen	Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Jumlah kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral / Jumlah kegiatan statistik sektoral x 100	Diskominfotik	Non Kumulatif (Nilai Terakhir)	Triwulan	RENSTRA
							Non Kumulatif (Nilai Terakhir)	Triwulan	RENSTRA
6	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	laporan	laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	Diskominfotik	Non Kumulatif (Nilai Terakhir)	Tahunan	RENSTRA
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase penanganan serangan siber yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	Serangan siber adalah mencuri, mengubah, dan menghancurkan data baik melalui jaringan atau aplikasi Pemerintah Kota Pasuruan	Jumlah serangan siber yang ditindaklanjuti tepat waktu / Jumlah Serangan siber x 100	Diskominfotik	Non Kumulatif (Nilai Terakhir)	Triwulan	RPJMD dan RENSTRA

No	Nama Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Kumulati/Non Kumulatif	Periode Data	Sumber Referensi
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase penanganan insiden keamanan informasi yang telah ditindaklanjuti	%	laporan penanganan (pemulihan, backup, analisis insiden) insiden siber	$\frac{\text{Jumlah serangan siber yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Serangan siber}} \times 100$	Diskominfotik	Kumulatif	Triwulan	RENSTRA
1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan Informasi. 2. Pelaksanaan Pengamanan Informasi Berbasis lektronik meliputi identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan dan pemulihan. 3. Pelaksanaan Pengamanan Informasi Berbasis Non Elektronik dilakukan dengan tahapan pemrosesan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi non elektronik 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Diskominfotik	Kumulatif	Triwulan	RENSTRA

Pasuruan , 07 Juli 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA PASURUAN

IMAM SUBEKTI, S.Sos, M.M.

NIP. 19730309 199201 1 001